

## ABSTRAK

M. LUTFI NURUL FAJARI ,12103193003 “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Program Petani Mandiri (Studi Kasus di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)” Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum ,Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2023, Pembimbing Yusron Munawir, S.H.I, M.H. Kata kunci: implementasi, kesejahteraan dan petani

Penelitian ini di dasari oleh Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Program Petani Mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani menjadi sejahtera, namun dalam implementasinya di Desa Ngumpakdalem masih terdapat kekurangan seperti: Kurangnya Transparansi Dana Hibah, Perioritas Pelatihan Masih Kurang Efektif dan Merata, Jaminan pembelian hasil panen kurang efektif, Sosialisasi asuransi gagal panen kurang informatif, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Program Petani Mandiri di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”

Fokus penelitian ini tentang Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Program Petani Mandiri di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan program petani mandiri di Desa Ngumpakdalem? 2) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap implementasi program petani mandiri di Desa Ngumpakdalem? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi program petani mandiri di Desa Ngumpakdalem? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan program petani mandiri terhadap kesejahteraan petani di Desa Ngumpakdalem. 2) Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap implementasi Program Petani Mandiri di Desa Ngumpakdalem. 3) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Program Petani Mandiri di Desa Ngumpakdalem. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1) Pelaksanaan program petani mandiri di Desa Ngumpakdalem masih ada beberapa program yang belum efektif terlaksana, yaitu: kurang transparansinya pemberian dana hibah, kurang meratanya pelatihan pengembangan usaha pertanian, kurang efektifnya jaminan pembelian hasil panen, penyampain program asuransi gagal panen kepada petani masih kurang informatif sehingga para petani menjadi bingung, beasiswa yang tidak di akses sepenuhnya oleh para keluarga petani, sehingga peningkatan kesejahteraan petani yang diharapkan melalui program petani mandiri belum bisa sepenuhnya terwujud dan belum mampu meningkatkan taraf hidup para petani menjadi lebih sejahtera.

2) Pelaksanaan program petani mandiri di Desa Ngumpakdalem dari segi yuridis masih belum sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2020 tentang Program Petani Mandiri, ketidaksesuaian tersebut diantaranya: a). Kurangnya Transparansi Dana Hibah: Dalam pasal 2 huruf (a) disebutkan bahwa, rumah tangga petani yang tergabung dalam poktan dan memenuhi syarat berhak mendapatkan bantuan dana hibah

maksimal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian dalam pasal 6 ayat 2 di sebutkan dalam pembelanjaanya di lakukan secara non tunai, tetapi para poktan di desa ngumpak menerimanya hanya berupa barang dan tidak mengetahui berapa nominal yang mereka terima secara pasti. b). Perioritas Pelatihan Masih Kurang Efektif dan Merata: Dalam pasal 2 huruf (b) ini disebutkan dalam program PPM ini memberikan akses perioritas pelatihan dan pengembangan usaha pertanian, namun dilapangan terdapat 4 kelompok tani dan baru 2 yang mendapatkan pelatihan. c). Jaminan pembelian hasil panen kurang efektif: Pada pasal 2 huruf (c), disebutkan dalam program PPM ini hasil panen dari petani akan dijamin pembeliannya oleh Dinas pertanian yang bekerja sama dengan BUMD/BUMDES dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga tengkulak, namun dalam prakteknya dilapangan para petani lebih memilih menjualnya kepada tengkulak dari pada ke-BUMD/BUMDES dengan alasan jika di jual kepada tengkulak, para petani tidak usah repot mencari tukang panen karena sudah satu paket dengan tengkulak, tetapi jika di jual ke-BUMD/BUMDES petani harus mencari tukang panen sendiri dan belum lagi masih terpotong untuk biaya tukang panen, oleh karena itu para petani lebih memilih menjual kepada tengkulak dan jika dikalkulasi perolehan sama saja antara menjual kepada tengkulak atau BUMD/BUMDES. d). Sosialisasi asuransi gagal panen kurang informatif: Dalam pasal 2 huruf (d) disebutkan adanya fasilitas asuransi gagal panen dalam program PPM ini. Menurut keterangan dari bapak Muh. Ngatno selaku KORLUH BPP Kecamatan Dander, dana asuransi tersebut ditanggung sepenuhnya oleh APBD PEMKAB Bojonegoro, namun praktiknya dilapangan ada beberapa petani yang menyatakan asuransi tersebut berbayar antara 10.000 dan ada yang menyebutkan 30.000 rupiah, bahkan ada yang tidak mengetahuinya sama sekali, hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dengan adanya program ini masih kurang merata, sehingga banyaknya terjadi mis komunikasi antara Dinas yang bertanggung jawab menaungi program ini dengan para petani yang ada dilapangan. sehingga program tersebut masih belum efektif untuk meningkatkan taraf hidup rumah tangga petani menjadi sejahtera. terwujud.

3). Jika di tinjau dari hukum islam, Pemerintah Kabupaten Bojononegoro melalui Dinas Pertanian sudah berusaha meningkatkan kesejahteraan para petani di Desa Ngumpakdalem melalui program PPM ini hal tersebut sama dengan wajibnya seorang pemimpin dalam menjalankan amanah untuk kemaslahatan masyarakat petani, program PPM ini masuk kedalam kategori masalah mursalah yakni tidak di larang oleh syariat Islam dan tidak diperintahkan juga oleh syariat Islam, dalam pelaksanaanya program PPM tersebut masih belum mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh petani yang ada di Desa Ngumpakdalem karena masih banyak terjadinya kekurangan dalam pengimplementasiannya di lapangan, seperti kurangnya keadilan, transparansi serta kurangnya amanah Pemerintah/khilafah yang dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro sehingga belum bisa terwujudnya kesejahteraan petani di Desa Ngumpakdalem.

Jadi program PPM ini belum bisa di rasakan sepenuhnya oleh petani di Desa Ngumpakdalem sehingga target untuk kesejahteraan petani belum

bisa tercapai, para petani di Desa Ngumpakdalem untuk hasil produksi sangat jarang mengalami surplus sering mengalami impas atau balik modal, hal itu di dasarkan pada temuan peneliti bahwa para petani tidak mengalami peningkatan pendapatan produksi pertanian, hasil panen habis di gunakan lagi untuk modal tanam selanjutnya. Jiika diklasifikasikan menurut teori dari BKKBN kesejahteraan petani di Desa Ngumpakdalem berada di tingkat keluarga sejahtera II yakni keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan psikologinya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan perkembangannya seperti menabung dan sarana informasi.

## ABSTRACT

M. LUTFI NURUL FAJARI, 12103193003 "Juridical Analysis of the Implementation of the Independent Farmer Program in Ngumpakdalem Village, Dander District, Bojonegoro Regency" Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University, 2023, Supervisor Yusron Munawir, S.H.I, M.H.

Keywords: implementation, welfare and farmers

This research is based on Bojonegoro Regent Regulation Number 43 of 2020 concerning the Independent Farmer Program which aims to improve the lives of farmers to become prosperous, not only paying attention to the profession of farmers but this program also pays attention to farmer families, starting from the head of the family to the children of a farmer, This independent farmer program has many benefits for farmers in Bojonegoro Regency, especially in Ngumpakdalem Village, Dander District.

The focus of this research on Juridical Analysis of the Implementation of the Independent Farmer Program in Ngumpakdalem Village, Dander District, Bojonegoro Regency are: 1) How is the implementation of the independent smallholder program in Ngumpakdalem Village? 2) What is the juridical review of the implementation of the independent smallholder program in Ngumpakdalem Village? 3) What is the review of Islamic law on the implementation of the independent smallholder program in Ngumpakdalem Village? This study aims to: 1) To find out the implementation of the independent farmer program on the welfare of farmers in Ngumpakdalem Village. 2) To find out the juridical review of the implementation of the Independent Smallholder Program in Ngumpakdalem Village. 3) To find out the review of Islamic Law on the Implementation of the Independent Farmer Program in Ngumpakdalem Village.

The research method used is qualitative research and empirical research. Data collection techniques used in this study were unstructured interviews, observation and documentation. In data analysis techniques, the authors use drawing conclusions and data analysis. While checking the validity of the data, the authors use an extension of the validity of the data, triangulation is used to check the validity of the data.

The results of this study indicate that: 1) there are still deficiencies regarding the implementation of the independent farmer program in Ngumpakdalem Village, so that the expected increase in farmer welfare through the independent farmer program cannot be fully realized and has not been able to increase the standard of living of the farmers to become more prosperous. 2) uneven socialization of the program by the Agriculture Service as the executor of the PPM Program, so that the benefits of PPM which aim to improve the standard of living of farmer families to become prosperous cannot be fully accessed by farmers. 3) the implementation of the independent farmer program in Ngumpakdalem Village which aims to improve the welfare of farming families has been running properly and the Bojononegoro Regency Government through the Agriculture Service has tried to improve the welfare of farmers in Ngumpakdalem Village through

the PPM program, this is the same as the obligation of a leader to carry out the mandate for the benefit of the farming community.

## ملاخص

محمد لطفي نورول فاجاري ١٢١٠٣١٩٣٠٠٣ التحليل القانوني لتنفيذ برنامج أصحاب الحيازات الصغيرة المستقل في قرية غومباك دالم ، مقاطعة دندر ، ريجنسي بوجونيغورو. برنامج دراسة القانون الدستوري ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة السيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية ٢٠٢٣ المشرف يسرون مناوور ، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ والرفاهية والمزارعين

يعتمد هذا البحث على لائحة ريجنت بوجونيغورو رقم ٤٣ لعام ٢٠٢٠ بشأن برنامج المزارعين المستقل الذي يهدف إلى تحسين حياة المزارعين ليصبحوا مزدهرون ، وليس فقط الاهتمام بمهنة المزارعين ولكن هذا البرنامج أيضًا يهتم بأسر المزارعين ، بدءًا من رب الأسرة لأبناء المزارع ، هذا البرنامج المستقل للمزارعين له فوائد عديدة للمزارعين في ريجنسي بوجونيغورو ، وخاصة في قرية غومباك دالم ، مقاطعة دندر.

يركز هذا البحث على التحليل القانوني لتنفيذ برنامج المزارع المستقل في قرية غومباك دالم ، مقاطعة دندر ، مقاطعة بوجونيغورو ، على النحو التالي: (١) كيف يتم تنفيذ برنامج أصحاب الحيازات الصغيرة المستقل في قرية ن غومباك دالم؟ (٢) ما هي المراجعة القانونية لتنفيذ برنامج أصحاب الحيازات الصغيرة المستقل في قرية غومباك دالم؟ (٣) ما هي مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن تنفيذ برنامج أصحاب الحيازات الصغيرة المستقل في قرية غومباك دالم؟ تهدف هذه الدراسة إلى: (١) التعرف على تنفيذ برنامج المزارع المستقل على رعاية المزارعين في قرية غومباك دالم. (٢) لمعرفة المراجعة القانونية لتنفيذ برنامج أصحاب الحيازات الصغيرة المستقل في قرية غومباك دالم. (٣) للوقوف على مراجعة الشريعة الإسلامية حول تنفيذ برنامج المزارع المستقل في قرية غومباك دالم.

أسلوب البحث المستخدم هو البحث النوعي والبحث التجريبي. كانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة عبارة عن مقابلات وملاحظة وتوثيق غير منظم. في تقنيات تحليل البيانات ، يستخدم المؤلفون استخلاص النتائج وتحليل البيانات. أثناء التحقق من صحة

البيانات ، يستخدم المؤلفون امتدادًا لصحة البيانات ، ويستخدم التثليث للتحقق من صحة البيانات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (١) لا تزال هناك أوجه قصور فيما يتعلق بتنفيذ برنامج المزارع المستقل في قرية نغومباك دالم ، بحيث لا يمكن تحقيق الزيادة المتوقعة في رفاهية المزارعين من خلال برنامج المزارع المستقل بشكل كامل ولم تتمكن من زيادتها. أن يصبح مستوى معيشة المزارعين أكثر ازدهارًا. (٢) التنشئة الاجتماعية غير المتكافئة للبرنامج من قبل دائرة الزراعة بصفتها الجهة المنفذة لبرنامج المزارع المستقل ، بحيث لا يمكن للمزارعين الوصول إلى فوائد برنامج المزارع المستقل التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة أسر المزارعين لتصبح مزدهرة. (٣) تنفيذ برنامج المزارع المستقل في قرية غومباك دالم والذي يهدف إلى تحسين رفاهية الأسر الزراعية كان يعمل بشكل صحيح وحاولت حكومة ريجنسي بوجونيجورو من خلال خدمة الزراعة تحسين رفاهية المزارعين في قرية غومباك دالم من خلال برنامج المزارع المستقل ، هذا هو نفس التزام القائد بتنفيذ التفويض لصالح المجتمع الزراعي.